



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN,  
BPJS KETENAGAKERJAAN, DJSN DAN BNP2TKI)**

---

- Tahun Sidang : 2013-2014
- Masa Persidangan : IV
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
- Dengan : Ketua Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2014
- Pukul : 14.00 WIB – selesai
- Acara : Membahas Progres Pelaksanaan Kesimpulan RDP Komisi IX DPR RI dengan Ketua Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing BUMN dan RDPU Komisi IX DPR RI dengan Ketua GEBER Buruh/Pekerja di BUMN tanggal 23 April 2014.
- Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I  
Gedung Nusantara I  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Hadir : A. Ketua Satuan Tugas Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN beserta jajaran.  
B. Anggota Komisi IX DPR RI  
orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI

## I. PENDAHULUAN

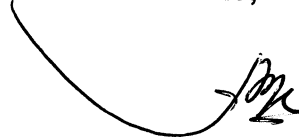
Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Ketua Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN dibuka pukul 15.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong Satgas Outsourcing BUMN untuk terus melakukan pengawasan dan klarifikasi terhadap seluruh kasus pekerja Outsourcing di lingkungan BUMN, termasuk mendesak Perusahaan BUMN yang belum memenuhi tuntutan para pekerja Outsourcing BUMN.
2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk menekan pimpinan perusahaan BUMN dalam melaksanakan Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai surat Menteri BUMN No.S325/MBU/S/2014 tanggal 25 Juni 2014 perihal tindaklanjut Nota Pemeriksaan atas Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain/outsourcing, yang belum dilaksanakan oleh perusahaan paling lambat tanggal 7 Juli 2014.
3. Komisi IX DPR RI meminta Satgas Outsourcing BUMN untuk lebih memaksimalkan pengawasan pada masalah pengangkatan pekerja sebagai pekerja tetap, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada pekerja maupun perusahaan.
4. Komisi IX DPR RI meminta kepada Satgas Outsourcing BUMN untuk memberikan laporan kasus pekerja Outsourcing BUMN secara rinci (jelas nama dan lokasi kerja) dan lebih transparan dalam menyelesaikan permasalahan pekerja Outsourcing BUMN. Laporan tersebut diserahkan kepada Komisi IX DPR RI paling lambat tanggal 7 Juli 2014.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk memperpanjang masa kerja Satgas Outsourcing BUMN dan memperkuat tugas dan wewenang Satgas tersebut dengan melibatkan perwakilan GEBER BUMN.

Rapat diakhiri pukul 17.45 WIB

KETUA RAPAT,



dr. RIBKA TJIPTANING